

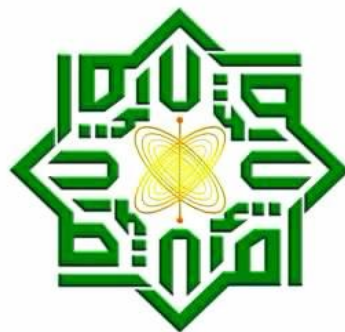
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PONGKAI ISTIQOMAH
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapai Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

NURFITRIANI

11625203965

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021 M/ 1442 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN NEGERI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM., yang ditulis oleh :

Nama : NURFITRIANI
 NIM : 11625203965
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2021
 Pembimbing Skripsi

Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 19710101 200003 1005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : NURFITRIANI
NIM : 11625203965
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahfawi, M. Sh

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 1986031 005



ABSTRAK

Nurfitriani, (2020): *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Menurut Ekonomi Islam.*

Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan penulis untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar menurut Ekonomi Islam. BUMDes di bentuk dengan tujuan menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah selama berdirinya BUMDes jumlah masyarakat yang tergolong sejahtera tingkat I masih menjadi mayoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Negeri untuk kesejahteraan masyarakat desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar serta factor pendukung dan penghambatnya. Serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri untuk kesejahteraan masyarakat desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

Penelitian ini dilakukan di desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, angket, wawancara, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah para pegawai dan masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai BUMDes dan 87 orang nasabah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, penulis menyimpulkan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa Harapan Negeri untuk kesejahteraan masyarakat desa Pongkai Istiqomah sudah dikatakan berperan, tapi belum maksimal. Peranan BUMDes terlihat dari unit-unit usahanya yang membantu dan mempermudah masyarakat. BUMDes Harapan Negeri juga berkontribusi yakni telah membantu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan dana sosial kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Hanya saja BUMDes Harapan Negeri ini tak lepas dari faktor penghambatnya sehingga masih terjadi ketimpangan kesejahteraan di dalam masyarakatnya.

Peranan BUMDes Harapan Negeri ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Peranan BUMDes telah membantu dan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam itu sendiri yakni untuk kemaslahatan ummat. Prinsip yang digunakan BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi untuk peminjaman modal yang belum dikembalikan masyarakat yang menjadi factor penghambat perkembangan BUMDes belum sesuai dengan Prinsip Islam, karena dalam Islam kita diwajibkan membayar hutang mengingat dampak hutang yang dibawa sampai ke akhirat kelak.

Keyword : Peranan, Kesejahteraan Masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya dan telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholi 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Skripsi berjudul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Menurut Ekonomi Islam”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak- pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Terimakasih yang paling istimewa untuk keluarga tercinta, terutama ibunda Nurdania dan ayahanda Damri yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan nya kepada penulis yang tidak mungkin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanggup penulis balas, dan tak henti-hentinya mendo'akan penulis dan memberikan penulis semangat sehingga penulis bisa sampai seperti ini. Terima kasih kepada kakak tercinta Mira yang selama ini juga turut membantu dan *mensupport* penulis selama kuliah, terima kasih juga kepada adik bungsu tercinta Muhammad Ilham yang turut mendoakan penulis, abang ipar Roni dan keponakan tercinta Azkadina Khanza. Terakhir, terima kasih juga kepada sanak keluarga yang berada di desa Sungai Pinang yang juga sangat membantu penulis selama kuliah.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak DR. H. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
4. Bapak DR. Heri Sunandar, M. Ci selaku wakil dekan I,
5. Bapak DR. Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan
6. Bapak Dr. H. Magfirah, M.Ag selaku wakil dekan III
7. Bapak Dr. Syahpawi selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc.Ak, selaku sekretaris jurusan Ekonomi syariah, serta Bapak/ Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat- nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Muhammad Nurwadid M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.A selaku pembimbing Akademis penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
10. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memerikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan buku- buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ombak Ali, Kakak Nurhidayati, Ombak Dendi, dan Rahmatul yang telah memberikan peluang untuk penulis meneliti dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sahabat seperjuanganku tersayang Sudi Maryam dan Al Ahyana, dan juga sahabat KKN ku yg selalu setia menemani selama kuliah.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Wassalam..

Pekanbaru, 25 Oktober 2020

Penulis,

NURFITRIANI
NIM.11625203965



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Model Kerangka Berfikir	11
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar	17
B. Letak Geografis Dan Demografis	18
C. Keadaan Ekonomi Desa Pongkai Istiqomah	19
D. Keadaan Sosial Desa Pongkai Istiqomah	22
E. BUMDes Harapan Negeri	23
1. Sejarah Singkat Pendirian BUMDes	23
2. Fungsi Berdirinya BUMDes	25
3. Tujuan dan Maksud Pendirian BUMDes	25
4. Struktur Kepengurusan BUMDes	26
5. Visi dan Misi BUMDes.....	26
6. Operasional dan Bidang Jasa BUMDes	26
F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	31
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	31
2. Tujuan Pendirian BUMDes	35
3. Landasan Hukum BUMDes	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tata Kelola BUMDes.....	38
5. Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	40
6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	42
7. Otonomi Desa	43
G. .Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	46

BAB III LANDASAN TEORI

A. Peranan.....	52
1. Pengertian Peranan	52
2. Dasar Hukum Menurut Al-quran dan hadist.....	60
3. Indikator Peranan BUMDes	63
B. Kesejahteraan Dalam Islam	56
1. Pengertian Kesejahteraan	57
2. Dasar Hukum Menurut Al-quran dan hadist	60
3. Indikator Kesejahteraan	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar	71
B. Factor Pendukung Dan Penghambat Peranan Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar	84
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah 2019	5
Tabel 1.2	Operasional Variabel	12
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk	19
Tabel 2.2	Mata Pencarian Desa Pongkai Istiqomah	20
Tabel 2.3	Sarana/Prasarana Desa Pongkai Istiqomah	21
Tabel 2.4	Tingkat Pendidikan desa Pongkai Istiqomah	23
Tabel 2.5	Sumber Dana/ Modal BUMDes Harapan Negeri	26
Tabel 2.6	Daftar Harga Barang Pertanian BUMDES Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah	29
Tabel 2.6	Daftar harga barang perikanan BUMDES Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah	30
Tabel 4.1	Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2	Informan Berdasarkan Usia	72
Tabel 4.3	Informan Berdasarkan Bidang Usaha	72
Tabel 4.4	Jawaban Responden Untuk BUMDes Mempermudah Serta Memberikan Manfaat Dengan Adanya Jasa BRI LINK	73
Tabel 4.5	Jawaban Responden Untuk BUMDes Membantu Menyediakan Kebutuhan Pertanian Yang Dapat Menunjang Penghasilan	74
Tabel 4.6	Jawaban Responden Untuk BUMDes Membantu Menyediakan Kebutuhan Perikanan Yang Dapat Menunjang Penghasilan	75
Tabel 4.7	Jawaban Responden Untuk BUMDes Membantu Dalam Menyediakan Gas LPJ Yang Dapat Menunjang Penghasilan.....	75
Tabel 4.8	Jawaban Responden Untuk BUMDes Mempermudah Serta Memberikan Manfaat Dengan Adanya Jasa Air Minum Isi Ulang	76
Tabel 4.9	Keuntungan BUMDes Harapan Negeri Tahun 2019 77	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.10 Jawaban Responden Terhadap Indikator Pendapatan	79
Tabel 4.11 Responden Untuk Indikator Konsumsi/Pengeluaran	79
Tabel 4.12 Jawaban Responden Terhadap Indikator Keadaan/ Fasilitas Tempat Tinggal Permanen dan Lengkap	80
Tabel 4.13 Jawaban Responden Terhadap Indikator Kemudahan Mendapatkan Layanan Kesehatan	81
Tabel 4.14 Jawaban Responden Terhadap Indikator Kemudahan Memasukan Anak Kejenjang Pendidikan	81
Tabel 4.15 Jawaban Responden Terhadap Indikator Kemudahan Mendapatkan Sarana Transportasi	82
Tabel 4.16 Skor Rata-rata Peranan BUMDes Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pongkai Istiqomah	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Kerangka Berfikir	12
Gambar 2.1 Struktur organisasi Pengelola BUMDES Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah pedesaan. Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.¹

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam pasal Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha

¹ Kasiyanto, *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik Desa. BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.²

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kesejahteraan berasal dari kata *sejahtera*'' yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.³ Kesejahteraan sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW serta dijadikan sebagai tujuan nabi untuk mensejahterakan kaumnya, dan tentunya sebagai rahmat bagi alam semesta, seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa' 21 ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), h. 2

³ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, h. 383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun (1994: 45) dalam bukunya Muqaddimah bahwa “manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa.⁴ Sebagaimana yang tersebut dalam Surah Huud ayat 6 yang berbunyi :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya :”dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

Namun jaminan itu tidak diberikan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surah Ar Ra’d ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

⁴ Ibid , Vol 3, No 2

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿٥٦﴾

Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasarkan pada potensi asli desa. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Desa Pongkai Istiqomah merupakan desa yang terletak di kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Di desa ini, rata-rata mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan perikanan. Desa Pongkai Istiqomah ini telah memiliki BUMDes didalamnya. Badan Usaha Milik Desa Pongkai Istiqomah ini didirikan pada tahun 2016 dan kemudian diberi nama BUMDes Harapan Negeri. Dari hasil survey pengamatan penelitian tentang BUMDes di desa Pongkai Istiqomah ini menjalankan beberapa jenis usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, yaitu :

1. BRI LINK
2. PERTAMINI

⁵ Herry Kamaroesid, *Op.cit*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. GAS LPJ 3 Kg
4. PERALATAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5. GALON AIR
6. AIR ISI ULANG

Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Negeri ini bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat di desa Pongkai Istiqomah ini. Namun selama hampir 5 tahun berdirinya badan usaha tersebut keluarga yang tergolong sejahtera tingkat I masih mayoritas di desa Pongkai Istiqomah ini. Hal tersebut dapat dilihat dari data tabel tingkat kesejahteraan masyarakat desa Pongkai Istiqomah pada tahun 2019 berikut :

TABEL 1.1
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA PONGKAI ISTIQOMAH 2019

Tingkat Kesejahteraan	2019
Jumlah Keluarga Sejahtera I	108
Jumlah Keluarga Sejahtera II	60
Jumlah Keluarga Sejahtera III	23
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	191

Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Pongkai Istiqomah tahun 2019

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian di BUMDes Harapan Negeri yang di latar belakang oleh tidak sesuainya harapan masyarakat di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas maupun fungsi BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengambil judul **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM “.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penulisan lebih difokuskan pada Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar ?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar

- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Negeri Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Islam.
- b. Sebagai khazanah intelektual tentang pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam pengembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
- c. Sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan- hubungannya antar variable dalam permasalahan yang ditetapkan.⁶

⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif, Dasar- Dasar*, (Jakarta : PT.Indeks, 2012), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena ingin tahu bagaimana peranan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pongkai Istiqomah.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai BUMDes serta masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar. Sedangkan Objek penelitian ini adalah peranan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Pongkai Istiqomah.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah semua nilai baik pengukuran ataupun perhitungan, baik kualitatif maupun kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.⁷ Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel di simbolkan dengan n selalu mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan populasi.⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang pegawai BUMDES Harapan Negeri dan seluruh masyarakat yang membeli di BUMDES yang berjumlah 678 orang atau 191 KK. Dari populasi tersebut penulis

⁷ Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 181-182.

⁸ M. Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sampel menggunakan rumus Slovin dimana dalam menentukan sampel batas toleransi kesalahan yang ditetapkan 10% .

$$n = N / (1 + N. e^2)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n = 678 / (1 + 678. (10\%)^2)$$

$$n = 678 / (1 + 678. 0,1^2)$$

$$n = 678 / (1 + 678 . 0,01)$$

$$n = 678 / (1 + 6.78)$$

$$n = 87$$

Berdasarkan dan perhitungan sampel diatas maka didapat sampel yang akan diteliti sebanyak 87 orang. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian angket yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁹ Data primer

⁹ Sugiharto, dkk, *Teknik sampling*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh langsung dan dikelola oleh penulis dan dalam hal ini berupa data hasil wawancara dan angket yang bersumber dari pihak BUMDes dan masyarakat desa Pongkai Istiqomah.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok, yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan dan referensi yang dapat membantu peneliti untuk melengkapi data-data.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang akan diteliti.
- b. Wawancara, merupakan interaksi dan komunikasi secara langsung.
- c. Angket, yaitu penulis mengajukan daftar pertanyaan yang di ajukan kepada nasabah di BUMDes desa Pongkai Istiqomah yang menjadi sampel untuk memperoleh jawaban yang penulis butuhkan.
- d. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari literature atau buku-buku ataupun pengambilan dokumen laporan penjualan yang ada hubungannya dengan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penganalisa data yang dilakukan penulis adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Karena data yang penulis gunakan adalah data kualitatif, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat maupun literature yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

F. Model Kerangka Berfikir**1. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yakni peranan Bumdes, Sedangkan variabel dependen (Y) adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mencari hubungan X dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Model kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Model Kerangka Berfikir



Keterangan:

Variabel X: Independen (Bebas)

Variabel Y: Dependen (Terikat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Variabel

Tabel 1.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Peranan BUMDes (X)	- Berkontribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	- Pendapatan - Konsumsi atau pengeluaran - Keadaan tempat tinggal dan fasilitas tempat tinggal - Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan - Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan - Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. ¹⁰

3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian dari segi teori maupun konsep.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Penelitian, Judul, Penerbit, Tahun, Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Benny Ferdianto/ Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat/Skripsi/2016	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa

¹⁰ Eko Sugiharto, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Barun Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, Vol.4. No.2, 2007, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama, Penelitian, Judul, Penerbit, Tahun, Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Yeni Fajarwati/Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pagedangan Di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang/Skripsi/2016	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)	Implementasi Program Bumdes
3.	Riyan Pradesyah/Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah Didesa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara/Jurnal/2018	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian berdasarkan letak geografis dan demografis, serta keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Sejarah singkat BUMDes Harapan Negeri, struktur organisasi, serta operasional BUMDes. Penjelasan umum tentang BUMDes, otonomi desa dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang pengertian peranan, dasar hukum peranan, indicator peranan. Pengertian kesejahteraan, dasar hukum kesejahteraan, indikator kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang peranan BUMDes Harapan Negeri untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pongkai Istiqomah menurut Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Sejarah Singkat Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar

Desa Pongkai Istiqomah merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Desa Pongkai Istiqomah ini merupakan desa hasil pemekaran pemerintah yang dulunya bernama “Pongkai Lama” yang kini telah tenggelam setelah pembuatan PLTA Koto Panjang. Setelah pemerintah memberikan ganti rugi tanah penduduk yang tenggelam tersebut, pemerintah menawarkan tiga pilihan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Ketiga pilihan itu sebagai berikut :

1. Pindah dengan pola bebas, yaitu pindah sendiri kedaerah yang lebih tinggi dan masih berada di kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Pindah dengan pilihan di transmigrasikan ke satu daerah dengan membuat atau menanam kebun karet yang di biayai oleh pemerintah mulai dari proses menanam sampai kebun karetnya menghasilkan dan tentunya tanpa dibebani hutang.
3. Dipindahkan ke daerah yang telah disiapkan pemerintah dan diberikan lahan kelapa sawit.

Desa “Pongkai Lama” akhirnya terpecah menjadi tiga desa, yang pertama yaitu desa Pongkai Istiqomah yang mengikuti pola pindah bebas dan tetap berada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Desa kedua adalah Pongkai Siberuang / Tabing yang pindah dengan pilihan yang kedua dan masih berada di Kecamatan yang sama. Dan terakhir desa Mayang Pongkai yang memilih pola ketiga yang berada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Masyarakat pindah pada tahun 1997, dengan demikian mereka telah berdomisili selama kurang lebih 23 tahun di kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar.¹¹

Kepala desa Pongkai Istiqomah yang pertama adalah bapak Daswir (alm) (1998), setelah itu digantikan bapak Muhammad Najuan (2007), setelah masa jabatan bapak Najuan berakhir, digantikan oleh bapak Mashuri pada tahun (2012), dan selanjutnya di pimpin oleh bapak Elvizon Toni dari tahun 2017 sampai sekarang.

B. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak Geografis

Desa Pongkai Istiqomah Terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Koto Ranah
- b. Sebelah Selatan : Desa Binamang,
- c. Sebelah Barat : Desa Koto Tuo
- d. Sebelah Timur : Desa Ranah Sungkai

Luas wilayah desa Pongkai Istiqomah adalah 6.048 Ha. Curah hujan desa Pongkai Istiqomah 82,900 Mm dengan suhu harian rata-rata 29° C. Desa ini berada ditinggikan 900 Mdl dari permukaan laut. wilayah ini merupakan dataran tinggi. Jarak dari Kecamatan ke desa Pongkai Istiqomah sekitar 4 Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor 15 menit atau jalan kaki kira-kira memakan waktu 20 menit. Sedangkan

¹¹Dokumen Desa Pongkai Istiqomah, Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarak ke Kabupaten Kampar sekitar 60 Km dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kira-kira memerlukan waktu 1.5 jam

2. Keadaan Demografis

Penduduk desa Pongkai Istiqomah berasal dari Melayu asli yang terdiri dari suku Domo, Melayu, Piliang, dan Pitopang, dan beberapa suku Jawa dari hasil pernikahan masyarakat desa dengan orang suku Jawa. Desa Pongkai Istiqomah ini memiliki adat yang sangat kental akan budaya melayu sejak dari nenek moyang terdahulu seperti adanya “basilek” untuk sambutan bagi pengantin pada acara pernikahan dan acara “Mandi Balimau Kasai” saat menyambut bulan suci Ramadhan.

Jumlah penduduk desa Pongkai Istiqomah pada akhir desember 2019 adalah 678 jiwa, yang terdiri dari 328 jiwa laki-laki dan 350 jiwa perempuan serta 191 jumlah kepala keluarga, yang terbagi dalam 3 wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Laki-laki	90	88	109
Perempuan	134	127	130
Total	224	215	239

Sumber: Data desa Pongkai Istiqomah 2019

C. Keadaan Ekonomi Desa Pongkai Istiqomah

Di desa Pongkai Istiqomah mata pencaharian yang paling banyak adalah pekebun karet dan sawit, karena pada umumnya masyarakat desa Pongkai Istiqomah ini bermata pencaharian sebagai petani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komoditas utama perkebunan warga adalah kebun kelapa sawit. Pemasaran hasil perkebunan ini dijual melalui tengkulak. Selain kebun kelapa sawit, sebagian besar penduduk disini juga bermata pencaharian sebagai petani karet atau pekebun karet. Berikut dijelaskan mengenai mata pencaharian masyarakat desa Pongkai Istiqomah:

Tabel 2.2
Mata Pencaharian Desa Pongkai Istiqomah

Petani	Pengrajin Industri Rumah Tangga	PNS	Nelayan
130	5	10	11

Sumber: Data desa Pongkai Istiqomah 2019

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa yang bekerja menjadi petani adalah pekerjaan yang paling banyak dengan total 130 orang. Penghasilan para petani ini rata-rata lebih kurang sebesar 1.500.000 perbulan. Selain petani, sebagian masyarakat desa Pongkai Istiqomah ini juga bermata pencaharian sebagai nelayan, pegawai negeri sipil dan juga pengrajin industri Rumah Tangga.

Disisi lain, apabila dilihat dari potensi yang ada, desa Pongkai Istiqomah merupakan desa yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai dalam menopang dan mendukung program IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adapun sarana prasarana desa Pongkai Istiqomah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana/Prasarana Desa Pongkai Istiqomah

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Posyandu	1 Unit	Layak Pakai
2	Masjid	1 Unit	Layak Pakai
3	Musholah	2 Unit	Layak Pakai
4	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak Pakai
5	Lapangan Voly	1 Unit	Layak Pakai
6	Lapangan Bola Kaki	1 Unit	Layak Pakai
8	Los Pasar	1 Unit	Layak Pakai
9	Gedung Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
10	SD Negeri	1 Unit	Layak Pakai
11	TK	1 Unit	Layak Pakai
12	MDA	1 Unit	Layak Pakai
13	Jalan Aspal	4 Km	Layak Pakai

Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana yang dimiliki desa Pongkai Istiqomah dalam keadaan baik atau layak pakai semuanya. Adanya sarana dan prasarana ini sangat membantu dalam berjalannya proses atau kegiatan yang ada di desa Pongkai Istiqomah ini.

Keberadaan desa Pongkai Istiqomah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, hal ini tiada lain adalah untuk mensinergiskan seluruh kegiatan baik yang datang dari usulan masyarakat maupun yang datang dari tingkat Kecamatan ataupun dari tingkat Kabupaten Kampar, sehingga dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan dan kerjasama untuk kelancaran peningkatan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah desa Pongkai Istiqomah tidak terlepas dari peran masyarakat dan tiga pilar komponen masyarakat yaitu Pemerintahan Desa, BPD dan LKMD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Keadaan Sosial desa Pongkai Istiqomah

Desa Pongkai Istiqomah adalah desa yang memegang prinsip kekeluargaan yang sangat kuat. Masyarakat desa Pongkai Istiqomah ini melakukan kegiatan-kegiatan di desa dengan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Hal ini tampak pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti pada pembuatan parit atau saluran air, memperbaiki jalan, pembuatan rumah dan yang lainnya. Masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan cara bergotong royong atau bersama-sama. Rasa sosialisasi masyarakat desa Pongkai Istiqomah ini sangat tinggi terhadap sesama.

Selain itu masyarakat desa Pongkai Istiqomah ini juga melakukan musyawarah jika ada sesuatu yang akan dilaksanakan di desa seperti pembuatan tournament sepak bola yang diadakan setiap tahunnya, acara pernikahan, kegiatan mempersiapkan hari kemerdekaan, mempersiapkan kegiatan pemilu dan lain-lain. Tujuan diadakan musyawarah ini adalah untuk mencapai mufakat dari kegiatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga masyarakat yang hadir bisa memberikan arahan ataupun saran mengenai kegiatan yang akan dibuat untuk kelancaran kegiatan tersebut. Desa Pongkai Istiqomah ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, seperti yang tertera dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan desa Pongkai Istiqomah

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	3	5
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Playgroup	1	4
3.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	50	56
4.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	40	54
5.	Tamat SD/ sederajat	75	46
6.	Tamat SMP / sederajat	65	80
7.	Tamat SMA / sederajat	77	66
8.	Tamat D-3 / sederajat	1	3
9.	Tamat S-1 / sederajat	16	36
Jumlah		328	350

Sumber: Data desa Pongkai Istiqomah 2019

Dari Tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah tingkat pendidikan masyarakat Pongkai Istiqomah bisa di bilang cukup bagus, masyarakat yang tidak tamat SLTP dan SLTA sederajat berjumlah 200 orang, dan untuk usia anak-anak yang belum masuk TK berjumlah 8 orang dan 5 orang anak-anak yang sedang mengikuti TK/playgroup. Sedangkan untuk tingkatan SD/Sederajat adalah 121 orang, tingkatan SMP/Sederajat yaitu 145 orang, tingkatan SMA/Sederajat yaitu 143 dan tamatan sarjana dari D-3 sampai S-1 yaitu 56 orang. Total keseluruhan dari tingkatan TK,SD sampai dengan tamatan S1 berjumlah 470 orang.

BUMDES Harapan Negeri

1) Sejarah Singkat Pendirian

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pongkai Istiqomah telah membuat peraturan Desa No.5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

Lembaga Badan Usaha Milik Desa ini didirikan pada tanggal 17 Februari 2016 yang kemudian di beri nama BUMDes Harapan Negeri desa Pongkai Istiqomah dengan No NPWP : 80.846. 512. 4-221.000.

Pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2020 bapak Elvizon Toni selaku Kepala Desa dan Komisaris BUMDes Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah telah menunjuk para Badan Pengurus BUMDes berdasarkan keputusan Kepala Desa No.15 tahun 2020 Tentang Kepengurusan BUMDes Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah, dimana tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan Pengawas/ Komisaris dan Pemerintah Desa.¹²

2) Fungsi Berdirinya BUMDES Harapan Negeri

- a. Sebagai lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.
- b. Sebagai wahana peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan.
- c. Sebagai wahana menjalin hubungan yang timbal balik anatar masyarakat dan pemerintah.

¹² Dokumen BUMDES Harapan Negeri Pongkai Istiqomah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

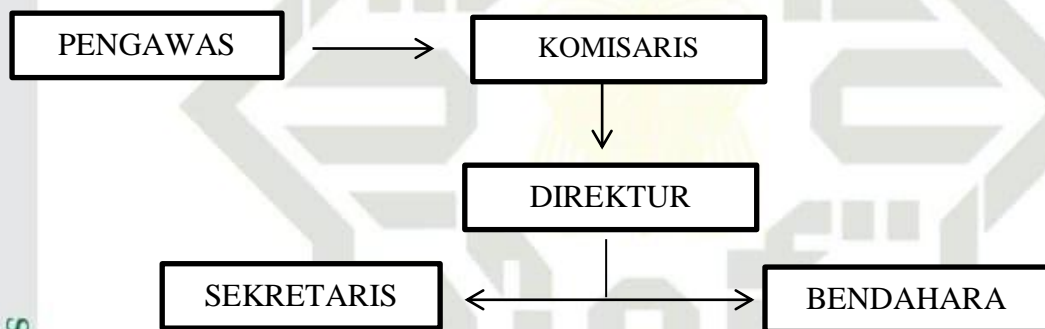
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES

Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMDES Harapan Negeri ini adalah untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang bergerak dalam sector ekonomi desa dalam bidang simpan pinjam dan potensi asli desa.

4) Struktur Kepengurusan BUMDES Harapan Negeri

Gambar 2.1
Struktur organisasi Pengelola BUMDES Harapan Negeri
Desa Pongkai Istiqomah



Keterangan :

Pengawas : Muhammad Najuan
 Komisaris : Elvizon Toni
 Direktur : Ali Husman
 Sekretaris : Dendi Rahman
 Bendahara : Nurhidayati ¹³

¹³Dokumentasi , Struktur Organisasi Pengelola BUMDES Harapan Negeri Desa Pongkai Istiqomah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Visi dan Misi

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa
- b. Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan
- c. Meningkatkan pendapatan asli desa
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa, memberikan kesempatan usaha, dan
- e. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan

6) Sumber Dana / Modal BUMDes Harapan Negeri

Tabel 2.5
Sumber Dana/ Modal BUMDes Harapan Negeri

No.	Tahun	Sumber Dana	Jumlah
1.	2016	Bank LED	Rp. 24.700.000
2.	2016	Dana Desa	Rp. 50.486.250
3.	2017	Dana Desa	Rp. 60.053.325
4.	2018	Dana Desa	Rp. 27.590.000
5.	2019	Dana Bankeu	Rp. 151.000.000
6.	2016-2019	Angsuran anggota	Rp. 48.872.000
7.	2016-2019	Simpanan anggota	Rp. 199.500
8.	2016-2019	Jasa anggota	Rp. 3.661.000
Jumlah			Rp. 366.563.075

Sumber : laporan BUMDes Harapan Negeri tahun 2019

7) Operasional Dan Bidang Jasa BUMDES Harapan Negeri

Pemerintah Desa Pongkai Istiqomah membentuk BUMDES sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDES juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki BUMDES juga sebagai sarana dalam memberdayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Harapan Negeri :

1. Bumdes Serving

Bumdes yang bersifat serving adalah Bumdes fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang tujuan pada seluruh masyarakat. Adapun Bumdes Serving desa Pongkai Istiqomah yakni :

a. BRI LINK

Biaya transfer dan tarik tunai BRI LINK di Bumdes Harapan Negeri ini adalah:

- Dibawah Rp.1000.000	= Rp.5000
- Rp.1000.000 – 3000.000	= Rp.10.000
- Rp.3000.000 – 5000.000	= Rp.15.000
- Rp.5000.000 – 10.000.000	= Rp.25.000

b. Isi Ulang Air Minum Antar Jemput Alamat

Untuk isi ulang air galon seharga Rp.2000 saja sedangkan untuk isi ulang air minum jerigen seharga Rp.3000. Setiap isi ulang air minum di BUMDes masyarakat akan mendapatkan kupon, dan kupon yang terkumpul sebanyak 10 kupon akan mendapatkan gratis 1 kali isi ulang air minum.

2. Bumdes Trading

Bumdes Trading adalah Bumdes yang fokus usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun Bumdes Trading desa Pongkai Istiqomah sebagai berikut:

- a. Gas LPJ 3 Kg dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat yakni seharga Rp.22.000. Sedangkan yang dijual di warung-warung seharga Rp. 28.000.
- b. PERTAMINI yang memudahkan akses pembelian minyak masyarakat desa Pongkai Istiqomah mengingat PERTAMINA jauh dari desa dan menempuh waktu berjam-jam. Sedangkan di PERTAMINI masyarakat bisa mengisi minyak mulai dari harga Rp.5000 yang tak dijual di warung-warung.
- c. Galon Air minum dengan berbagai ukuran dan harga yang murah mulai dari harga Rp.40.000 sampai dengan Rp.50.000.
- d. Peralatan dan Perlengkapan Pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
Daftar Harga Barang Pertanian BUMDES Harapan Negeri
Desa Pongkai Istiqomah

No.	Nama Barang	Harga Jual
1.	Dodos camel 4 ¼	Rp . 90.000
2.	Dodos camel 4	Rp. 86.000
3.	Klem Double Besi	Rp. 32.000
4.	Klem Double Merah	Rp. 51.000
5.	Klem Tunggal	Rp. 25.000
6.	Klem Senter Merah	Rp. 75.000
7.	Tojok	Rp. 35.000
8.	Sepatu Boot Kuning	Rp. 98.000
9.	Pisau 112	Rp.100.000
10.	Egrek LSM	Rp. 180.000
11.	Fiber 4-8 (P/C)	Rp. 320.000
12.	Keranjang Rapat	Rp. 175.000
13.	Keranjang Tunggal	Rp. 195.000
14.	Cuka Karet	Rp. 3000-/ Pcs
15.	Pisau Penyadap Karet	Rp. 36.000
16.	Sepatu Petani	Rp. 13.000
17.	Roundup 1 Lt	Rp. 80.000
18.	Gramaxon 1 Lt	Rp. 70.000
19.	Polar Elektrik 2 in 1	Rp. 650.000
20.	Jago Tani 250 ml	Rp. 70.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Perlengkapan Perikanan

Tabel 2.6

**Daftar harga barang perikanan BUMDES Harapan Negeri
Desa Pongkai Istiqomah**

No.	Nama Barang	Harga Jual
1.	Hapa Bibit 4x 1.30	Rp.186.000
2.	Timah CHK	Rp. 78.000
3.	Waring Hitam Jangkar	Rp. 52.000
4.	BNG Nilon Arida Putih 210D/21	Rp.180.000
5.	Tali United pak 1.0 mm	Rp. 140.000
6.	JGR Burung CH 210/4	Rp. 50.000
7.	Terpal A3 BB seido 3x5	Rp. 92.000
8.	JRG Capt 0.28	Rp. 100.000
9.	Marlin 1/20	Rp. 6.000
10.	Jala Ikan Atom R.TMH 7 Hasta	Rp. 260.000
11.	Jala Udang atom R.TMH 8 Hasta	Rp. 332.000
12.	Timah Rantai Kawat 12-0	Rp. 77.000
13.	Jarring FF 0.20	Rp. 53.000
14.	PCG Kail Carp Fish All Size	Rp. 4000
15.	Joran Hawking Set 150	Rp. 110.000
16.	Kaca Mata Selam Biru ULT	Rp. 22.000
17.	Baju Pelampung	Rp. 128.000
18.	Pelampung Utecate Regis	Rp. 7.000
19.	Pancing Captain	Rp. 45.000
20.	Tas Joran Biasa 60 cm	Rp. 23..000 ¹⁴

¹⁴ Daftar Harga Barang BUMDes Harapan Negeri Pongkai Istiqomah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata, yaitu “badan usaha” yang diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, sedangkan “milik” dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan. Sementara desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri. Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh system pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sector perekonomian masyarakat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa.¹⁵

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika System Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya , 2007), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁶

Anom Surya Putra telah mendefenisikan BUMDes kedalam beberapa pengertian, diantaranya:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.¹⁷

Maryunani mendefenisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial

¹⁶ Herry Kamaroesid, *Op.cit*, h. 3

¹⁷ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Republik Indonesia, 2015),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.¹⁸ Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.¹⁹ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “kebutuhan” dan “potensi desa” adalah :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
2. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.

¹⁸ Maryunani , *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: V. Pustaka Setia , 2008), h. 35

¹⁹ Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural And Development Volume No V 1 Februari 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa, yang terdiri dari (1). Beras, sagu, atau jagung, (2). Gula pasir, (3). Sayuran dan buahan, (4). Daging sapi, ayam, dan ikan, (5). Minyak goreng dan margarin, (6). Susu, (7). Telur ayam, (8). Minyak tanah atau gas LPJ, (9). Garam beryodium.
4. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis, industry dan kerajinan rakyat.²⁰

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham dan andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakal dari budaya local (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village police*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalnya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).²¹

²⁰ Romi Saputra, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancak Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 9 No 1, h. 22

²¹ Maryunani, *Op.Cit*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Maksud pembentukan BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (Pades).
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Adapun pendirian BUMDes terdiri dari 4 tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.
3. Menumbuhkembangkan usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan.²²

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling

²² Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur : Makalah BPMPD, 2004), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini dituntut mampu memberikan pelayanan non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

3. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah :

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213

ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

2. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa : Pasal 78

- 1). Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- 3). Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2). Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan Masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - d) Pinjaman
 - e) Penyertaan modal
- 3). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak dan kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Permodalan
- e. Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban

4. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*.
- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direlisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktik ijon dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan BUMDes diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, melainkan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya. Semua itu menuntut keterlibatan Pemerintah Kabupaten.
- e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes adalah (1). Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan sebagian besar bermatapencaharian di sector pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat informal, (2). Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal perkembangan usaha selanjutnya, (3). Masyarakat yang dalam hal tidak dapat mencukupi kehidupan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat, dan yang terpenting adalah (4). Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh system

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk adaptasi menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar hasil kerja masyarakat desa.²³

5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes, yaitu:

1. *Kooperatif*, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*, maksudnya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus dilakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*, maksudnya apapun aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

²³ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung-jawabkan secara teknis maupun administrasi.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperative*), membangun kebersamaan, menjakin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.²⁴ Pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan asas :

- a. Asas kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang di dorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan maslah kehidupan yang dirusaknya.
- b. Asas kesetaraan, semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan ataupun direndahkan.
- c. Asas musyawarah, semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan, ide atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

²⁴ *Ibid*, h. 11-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas keterbukaan, dalam hal ini semua dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.²⁵

6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes**a. BUMDes *Banking***

BUMDes yang bertipe *Banking* menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan peminjaman modal.

b. BUMDes *Serving*

BUMDes yang bersifat *serving* adalah Bumdes fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang tujukan pada seluruh masyarakat.

c. BUMDes *Brokering*

BUMDes *brokering* merupakan BUMDes yang menjadi perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar, ataupun yang menjual jasa pelayanan kepada masyarakat seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp dan sebagainya.

²⁵ Chabib Sholeh, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2014), h. 83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. BUMDes *Trading*

BUMDes *trading* merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan keperluan kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian maupun perikanan.

e. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. BUMDes *renting* yakni penyewaan traktor, pekasas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah, maupun penyewaan mesin mollen.

7. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum. Baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²⁶

Otonomi Desa merupakan suatu peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan public dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai cara untuk mewujudkan serta menyatakan penyelenggaraan pemerintah

²⁶ HAW Widjaya, *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal. Dengan demikian, otonomi desa memberikan kekuasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di desa tersebut.²⁷

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh karenanya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Di sinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.

Otonomi desa dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa, pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsive terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik. Dengan begitu, diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa

²⁷ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan masyarakat di desanya.

Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut ekonomi desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan masyarakat dalam kerangka demokrasi, dimana desa yang merupakan unit pemerintah terdekat dengan rakyat diberikan kekuasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga.

Konsekuensinya desa harus mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak, besar kemungkinan akan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa otonomi desa merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan, baik instusi maupun administrasi yang dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan yang positif berupaya percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan public, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

G. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**1. Pembangunan Desa**

Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, social budaya, polotik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa merupakan satu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.²⁸

Pembangunan pedesaan juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.²⁹ Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama, yaitu:

- a. Pembangunan desa dalam aspek fisik. Yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan. Yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan

²⁸ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 392

²⁹ *Ibid*, h. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat.³⁰

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan dan berkelanjutan (*people centered, development participatory, empowering and sustainable*).³¹ Pemberdayaan masyarakat juga dimaksud dengan usaha menjadikan masyarakat yang semakin berdaya untuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik³².

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan diri, ahrkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social,

³⁰ Raharjo Adikasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 17

³¹ Hasyemi Rafsanjani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi pada desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 4, h. 67-72

³² Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LECPress, 2003), h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas dan memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan strukrur social ekonomi mastarakat. Mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses, yaitu :

1. Akses terhadap sumber daya.
2. Akses terhadap teknologi.
3. Akses terhadap pasar.
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilisasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk usaha bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.³³ Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan harga diri manusia, terutama mereka yang berada dalam lilitan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jika seseorang berdaya berarti dia telah berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena itu, agar seseorang atau komunitas berdaya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan akses dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang. Dalam Islam, konteks pemberdayaan telah Allah firmankan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

³³ HAW Widjaya, *Op.Cit*, h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah SWT telah memotivasi manusia untuk terus berusaha dan mencari rezeki sehingga bisa mengentaskan kemiskinan, baik pada dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat di sekelilingnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Peranan

1. Pengertian Peranan

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.³⁴ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti dia telah menjalankan suatu peran.³⁵

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.³⁶ Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social, adapun syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

³⁴ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta : 1984) , h. 735

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2013), h. 212

³⁶ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Social Masyarakat*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1982,) h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan dan akhirnya muncul lah peran.³⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

2. Dasar Hukum Peranan Dalam Islam

Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengemban titah-titah amanat-Nya serta memperoleh kasih sayang-Nya yang sempurna.³⁸ Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Yang *pertama*, sebagai seorang hamba yang

³⁷ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnose Dan Intervensi)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 76

³⁸ Rachmat Ramadhan, *Prophetic Leadership*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2008) , h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bentuk tanggungjawab 'ubudiyyah terhadap Tuhan yang menciptakannya. Kedua, sebagai *khalifah* yang memiliki jabatan *ilahiyyah* sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.

Sedangkan hadist Rasulullah SAW tentang peranan adalah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ
الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

Tugas dan tanggung jawab atau yang kita sebut peranan itu merupakan amanat tuhan yang sungguh besar dan berat. Karenanya , semua yang ada di langit dan bumi menolak amanat dari Allah yang ditawarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal manusia memiliki potensi untuk mengingkari.

3. Indikator Peranan

a. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan Kedudukan

Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan, artinya orang tersebut menjalankan suatu peran. Antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena tergantung satu sama lain. Taka ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.³⁹

b. Melaksanakan Hak Dan Kewajiban

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan diberikan kepada seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban telah dilaksanakan maka seseorang akan berhak menuntut haknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Maka apabila seseorang itu telah melaksanakan hak dan kewajibannya, artinya ia sudah menjalankan peran.

4. Indikator Peranan BUMDes

Adapun indikator peranan BUMDes adalah dengan berkontribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kesejahteraan Dalam Islam

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁴⁰ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun bathiniah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan social adalah upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social (UU No.11 Tahun 2009). Makna kesejahteraan berdasarkan tiga perspektif, yaitu :

⁴⁰ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, h. 383.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam system ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminology yang kontroversial karena mempunyai banyak pengertian. Diantaranya diartikan dengan materialisme dan hedonism murni, sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala berkelimpahan harta benda secara materi yang mementingkan kenikmatan fisik semata yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Dengan pengertian inilah tidak mengherankan apabila adanya konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi, maksimasi konglomerasi kekayaan dan kepuasan hawa nafsu.⁴¹

b. Kesejahteraan dalam Perspektif Masyarakat Modern

Defenisi kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan social serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁴² Menurut pengertian HAM bahwa setiap laki-laki

⁴¹ Umar Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (terj), (Jakarta : SEBI, 2001), h. 3

⁴² Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Cet, ke-4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun perempuan, pemuda anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa social, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

c. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah *falah*.⁴³ Konsepsi *falah* mengacu pada tujuan syariat Islam dan juga tujuan ekonomi Islam yaitu terealisasi dan terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *al-maqoshid as-syari'ah* yakni agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Sedangkan dalam KBBI sejahtera mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kesejahteraan social sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiya’:107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴³ Anto, M.B Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam, Cet.1*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2003), h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan social. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi hubungan dengan sesama manusia juga (*habl min allah wa wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan social.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: 1. untuk memenuhi kehidupan masing-masing, 2. untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, 3. untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan⁴⁴.

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi. Kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikator, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi. Kesejahteraan oleh Imam Al-Ghazali dikenal dengan istilah *al-mashlahah* yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta,

⁴⁴Amirus Sodik, *Op.Cit*, h. 389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kehidupan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.⁴⁵

2. Dasar Hukum Kesejahteraan Dalam Islam

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Q.S

An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :''dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar''.

Berpijak dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dan kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan. Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan. Hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi manusia yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset termahal bagi orang

⁴⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua. Al-quran juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat diatas adalah memperoleh rezeki yang halal dan baik, ada juga yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai dengan memakan dengan rezeki yang halal dan memiliki sifat *qanaah*. Pendapat lain mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rezeki dari Allah.

Berdasarkan pada ayat surah An-Nahl diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang. Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah SWT, maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan.

Surah Al-Hadiid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي مَوَالٍ
 الْأَوَّلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
 يَكُونُ حُطَمًا ۚ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya : ‘ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu’.

Berkaitan dengan ayat diatas, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal dengan masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta dan duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. Karena berlomba-lomba dalam kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia kedalam kebinasaan. Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indicator kesejahteraan adalah tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan sebagainya itu bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serba hedonis dan matrealistik. Dengan demikian penanaman tauhid merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.⁴⁶

3. Indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus di penuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: *pertama*, anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. *Kedua*, seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, *ketiga* seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, *keempat* bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, *kelima* bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.⁴⁷

Dari beberapa penjelasan indicator di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi⁴⁸ :

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang di peroleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

⁴⁶ *Ibid*, h. 396

⁴⁷ Sub Direktorat Statistik, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, (Jakarta : Badan Pusat Statistic, 2008), h. 4

⁴⁸ *Ibid*, h. 17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tinggi (Rp. >5.000.000)
2. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
3. Rendah (<Rp. 1.000.000)

2. Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/ keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan diindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran non makanan <80% dari pendapatan.

3. Keadaan atau Fasilitas Tempat Tinggal

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dindin, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah permanen (milik sendiri).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Terdapat lima tingkat kesejahteraan, yaitu :

- a. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologinya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan social psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.
- d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan.
- e. Keluarga sejahtera III- plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan social psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

4. Kemudahan Mendapatkan Layanan Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Deveelopment Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indicator komposit yang terdiri dari indicator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan serta ekonomi. Apabila satu keluarga mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera.

5. Kemudahan Memasukan Anak Kejenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan social. Pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan social dan kemajuan bangsa. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun. Apabila satu keluarga tersebut mudah dalam memasukan anaknya ke jenjang pendidikan, baik formal maupun ke jenjang yang lebih tinggi, maka keluarga tersebut boleh dikatakan sejahtera.

6. Kemudahan Mendapatkan Sarana Transportasi

Kemudahan mendapatkan sarana transportasi juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Apabila seseorang atau satu keluarga tersebut mampu atau dikatakan mudah dalam mendapatkan alat transportasi maka dapat dikatakan keluarga tersebut sejahtera. Karena disamping mereka telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka bahkan sanggup memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

4. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Al -Qur'an telah menyinggung indicator kesejahteraan dalam Q.S Quraissy : 3-4 yang berbunyi :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya :3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). 4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu :

- a. Ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhan-nya secara ikhlas dalam beribadah merupakan indikator utama kesejahteraan.

- b. Hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Ayat diatas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberikan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statement itu menunjukan bahwa dalam ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indicator kesejahteraan. Meskipun begitu, hendaknya bersifat secukupnya (tidak *mubadzir*) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi menggeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi menggunakan cara-cara yang dilarang agama.
- c. Hilangnya rasa takut. Hal ini merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan dan sebagainya terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.⁴⁹

⁴⁹ Amirus Sodik, *Op.Cit*, h. 390-391

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BUMDes Harapan Negeri desa Pongkai Istiqomah dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan BUMDes Harapan Negeri desa Pongkai Istiqomah untuk kesejahteraan masyarakat sudah bisa dikatakan berperan. Melalui peranannya BUMDes sudah membantu masyarakat, mempermudah serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang diwujudkan dengan adanya unit-unit usahanya. BUMDes Harapan Negeri juga sudah berkontribusi yang diwujudkan dengan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan dana sosial kepada masyarakat. Hanya saja, dilihat dari indikator kesejahteraan, peranan BUMDes dikatakan belum maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat di desa Pongkai Istiqomah belum merata dan masih adanya ketimpangan antar masyarakat di desa Pongkai Istiqomah.
2. Pelaksanaan peranan BUMDes tentunya membawa beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, yakni faktor pendukung dan faktor penghambatnya.
3. Peranan BUMDes Harapan Negeri telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Peranannya telah membantu dan mempermudah masyarakat. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yakni untuk kemaslahatan ummat. Prinsip BUMDes

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam usahanya juga telah sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja untuk dana pinjaman yang belum dikembalikan masyarakat kepada BUMDes tentunya belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena dalam Islam kita diwajibkan membayar hutang mengingat bahwa hutang yang tidak dibayar akan sampai dampaknya diakhirat kelak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa diharapkan melakukan peningkatan kerja sama baik dengan masyarakat. Perlu melakukan pelatihan yang maksimal bagi para pelaksana BUMDes maupun bagi masyarakat agar pemahamannya dan partisipasinya mengenai BUMDes lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi pengurus BUMDes Harapan Negeri kedepannya diharapkan dapat lebih memperluas dan meningkatkan peranannya terhadap masyarakat di desa Pongkai Istiqomah seperti memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja Sumber Daya Manusia pengurusnya.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih giat dalam bekerja dan berusaha. Lebih bertanggungjawab, serta mampu memanfaatkan unit usaha BUMDes dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat desa Pongkai Istiqomah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahu Ahmadi. 1982. *Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Social Masyarakat*. Jakarta : Bina Ilmu
- Ahmad Qodri. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. Jakarta: LECPress
- Amalia Sri Kusuma Dewi. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural And Development Volume No V 1 Februari 2014
- Anne Ahira. 2012. *Terminologi Kosakata*. Jakarta: Aksara
- Anto, M.B Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam Cet.I*. Yogyakarta: Ekonosia
- Chabib Sholeh. 2014. *Dialetika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Bumi Aksara
- Dendi Rahman. *Wawancara . Sekretaris BUMDes Pongkai Istiqomah*. 24 Januari 2020
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika System Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Dokumen BUMDES Harapan Negeri Pongkai Istiqomah
- Dokumen Desa Pongkai Istiqomah Tahun 2020
- Eko Sugiharto. 2007. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Barun Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistic*. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan. Vol.4.No.2
- Gumanjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
- Hasyemi Rafsanjani, dkk. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi pada desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP).Vol 1 No. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herry Kamaroesid. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Husein Usman Dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Pengantar Statistik*. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Kasiyanto. 1994. *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara
- Kementrian Negara. *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*. <https://www.kemeneqpd.go.id/>. Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2020
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Miftah Thoha. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnose Dan Intervensi)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad Toha. Nasabah BUMDes. Pongkai Istiqomah. *Wawancara*. 12 November 2020
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur : Makalah BPMPD
- Raharjo Adikasmita. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahma Diana. Nasabah BUMDes. Pongkai Istiqomah. *Wawancara*. 13 November 2020
- Romi Saputra. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancak Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Manajemen Pemerintahan. Vol 9 No 1
- Samiaji Sarosa. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Dasar- Dasar. Jakarta : PT.Indeks
- Sodik Amirus. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2
- Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sub Direktorat Statistik. 2008. *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*. Jakarta : Badan Pusat Statistic
- Sugiharto. dkk . 2001. *Teknik sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Surya Anom Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Republik Indonesia
- P. Guritno. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Ekonomi*. Jakarta : Cet ke II
- Toha Anggoro Dkk. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Umar Chapra. 2001. *The Future of Economics : An Islamic Perspektive* (terj). Jakarta : SEBI
- W. J. S. Poerwadarminto. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Warkum Sumito. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Cet ke-4 . Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Widjaya. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wikipedia. *Kontibusi*. Diakses dari <http://id.wikipedia.org/10-Agustus-2020/11.58>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN
KUISIONER PENELITIAN

A. Kata Pengantar

Kepada informan terhormat, melalui kuisisioner penelitian ini peneliti mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi lembaran pertanyaan dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang informan alami. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya, dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi. Dan hasil penelitian ini tentunya tidak akan merugikan pihak manapun. Adapun judul penelitian ini adalah:

“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM”.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab dan mengembalikan kuisisioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dengan pahala. aamiin..

B. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jeniskelamin :
Pekerjaan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh ?
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD
 - c. SMP
 - d. SMA
 - e. S1

C. Petunjuk Pengisian

1. Mohon baca dan pahami dengan baik setiap pertanyaan di dalam kuis ini.
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur.
3. Berikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling benar dan sesuai dengan keadaan yang dialami.
4. Terima kasih untuk kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan mengembalikan kuis ini.

D. Pertanyaan Untuk Peranan BUMDes

No	Keterangan	Ya	Kurang	Tidak
1.	BUMDes Mempermudah Serta Memberikan Manfaat Dengan Adanya Jasa BRI LINK			
2.	BUMDes Membantu Menyediakan Kebutuhan Pertanian Yang Dapat Menunjang Penghasilan			
3.	BUMDes Membantu Menyediakan Kebutuhan Perikanan Yang Dapat Menunjang Penghasilan			
4.	BUMDes Membantu Dalam Menyediakan Gas LPJ Yang Dapat Menunjang Penghasilan			
5.	BUMDes Mempermudah Serta Memberikan Manfaat Dengan Adanya Jasa Air Minum Isi Ulang			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

No.	Keterangan	Ya	Kurang	Tidak
1.	Pendapatan saya sangat tinggi, yakni diatas Rp5.000.000			
2.	Pendapatan saya sedang, yakni Rp1.000.000-5.000.000			
3.	Pendapatan saya rendah, yakni kurang dari Rp1.000.000			
4.	Pengeluaran /konsumsi saya tinggi, yakni diaatas Rp5.000.000			
5.	Pengeluaran /konsumsi saya sedang, yakniRp1.000.000-5.000.000			
6.	Pengeluaran /konsumsi saya rendah, yakni dibawah Rp1.000.000			
7.	Rumah yang saya tempati sekarang layak huni, permanen, kualitas dinding, atap, lantai, dan wc dalam keadaan baik.			
8.	Fasilitas rumah yang saya tempati lengkap			
9.	Jika saya sakit, saya dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.			
10.	Dengan penghasilan saya saat ini, sudah mampu menyekolahkan anak-anak sampai kejenjang yang tinggi			
11.	Dengan penghasilan saat ini, saya sudah mampu membeli sarana transportasi			

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7031/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURFITRIANI
NIM : 11625203965
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Badan Usaha Milik Desa Pongkai Istiqomah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Negeri Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar Menurut
Ekonomi Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Dis. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37585
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7031/2020 Tanggal 8 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|------------------|---|-----------------|
| 1. Nama | : | NURFITRIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11625203965 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |

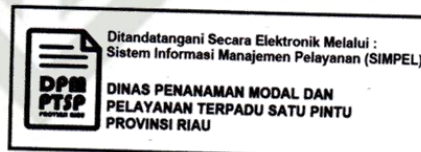
7. Lokasi Penelitian : **NEGERI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI
 ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM
 BADAN USAHA MILIK DESA PONGKAI ISTIQOMAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Desember 2020



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/40

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/IZIN-RISET/37585 tanggal 30 Desember 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURFITRIANI |
| 2. NIM | : | 11625203965 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN NEGERI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM |
| 8. Lokasi | : | BADAN USAHA MILIK DESA PONGKAI ISTIQOMAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 25 Januari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP.: 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN NEGERI
DESA PONGKAI ISTIQOMAH
KECAMATAN XIII KOTA KAMPAR**

Alamat: JL. Koto Indah Dusun I Pongkai Istiqomah

Kode Pos 28453

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/Bumdes-HN/PI/2020

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ali Usman S.Pd.I
Jabatan : Direktur Bumdes harapan Negeri

MENERANGKAN

Nama : Nurfitriani
Nim : 11625203965
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
Judul Skripsi : PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) HARAPAN NEGERI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM
Alamat : Desa Pongkai Istiqomah Kec. XIII Koto Kampar

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di BUMdes HARAPAN NEGERI Desa Pongkai Istiqomah, terhitung mulai tanggal 01 November 2020- 31 April 2021

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pongkai Istiqomah, 31 Desember 2020

Direktur BUMdes Harapan Negeri



ALI USMAN, S.Pd.I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURFITRIANI
NIM : 11625203965
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM

Pembimbing : Muhammad Nurwahid, MAG

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Februari 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : NURFITRIANI
NIM : 11625203965
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahfawi, M. Sh

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



NURFITRIANI lahir pada tanggal 6 desember 1996 di Pongkai.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Damri dan ibu Nurdania. Penulis bertempat tinggal di desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII

Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Pendidikan penulis yaitu telah menempuh pendidikan formal di SDN 031 Pongkai Istiqomah tahun 2003 dan selesai tahun 2008. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 3 XIII Koto Kampar pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012. Selanjutnya mengenyam pendidikan di SMAN 1 XIII Koto Kampar tahun 2013 jurusan IPA dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2016.

Semasa perkuliahan, penulis telah melakukan magang di Dealer Honda Muara Pulau Artha Motor desa Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar pada bulan Juli- Agustus 2018. Serta telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 di desa Tanjung Kuyo, Pelalawan.

UIN SUSKA RIAU